

POLICY BRIEF

SISTEM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI

Disiapkan oleh:
Sakinah Finance Institute, Sakinah Finance
PB.024/SF/III/2024



Policy Brief; Sistem Pembiayaan Pendidikan Tinggi

Ringkasan Eksekutif

Tujuan dari *policy brief* ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan pada sistem pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini dipicu dari berita yang viral baru-baru ini dimana jumlah pinjaman online berbasis bunga yang sudah diberikan kepada mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Indonesia mencapai Rp.450 miliar per 26 Februari 2024. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebutkan bahwa produk pinjaman yang mengenakan bunga tidak sejalan dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu Pasal 76 UU Pendidikan Tinggi yang melarang pemberian pinjaman berbunga. Metodologi yang digunakan adalah deskriptif mulai dari penentuan tujuan, proses penelitian termasuk pencarian data, analisa manfaat dan biaya, dasar pilihan kebijakan, dan rekomendasi. Setelah melakukan proses penelitian, maka *policy brief* ini mengusulkan rekomendasi yaitu Bantuan Biaya Kuliah Mahasiswa dengan Skema Pinjaman Sosial. Adapun di dalam tahapan implementasi, beberapa organ yang harus dilibatkan antara lain pemerintah dan pemberi pinjaman sosial.

1. Pendahuluan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi sektor pendidikan pada Juni 2023 mencapai 2,75%, menunjukkan kenaikan indeks dari 109,62 pada Juni 2022 menjadi 112,63 pada Juni 2023. Di antara sub-kelompok tersebut, inflasi tahunan tertinggi terjadi pada sub-kelompok pendidikan lain sebesar 3,8%, sedangkan yang terendah terdapat pada sub-kelompok pendidikan menengah sebesar 2,14%. Sub-kelompok ini memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,15% pada Juni 2023 secara keseluruhan.

Penyumbang inflasi tahunan terbesar adalah biaya pendidikan akademik atau universitas sebesar 0,06%. Namun secara bulanan, kelompok ini tidak memberikan kontribusi terhadap inflasi nasional. Dalam kasus tertentu, terutama pada sekolah swasta atau universitas bergengsi, inflasi biaya pendidikan bisa mencapai 10-15% per tahun (BPS, 2023). Kenaikan biaya pendidikan pada berbagai jenjang tersebut menunjukkan adanya pengeluaran biaya pendidikan yang semakin besar.

Lebih lanjut, Indonesia memiliki tiga skema pembayaran biaya pendidikan yaitu beasiswa penuh, beasiswa parsial dan pembayaran mandiri. Beasiswa penuh dan parsial disediakan oleh pemerintah dan swasta seperti beasiswa kementerian, beasiswa kampus tujuan, beasiswa lembaga sosial, beasiswa perorangan, beasiswa perusahaan dan lain sebagainya.

Sementara pembayaran pendidikan mandiri disediakan oleh mahasiswa, orangtua atau keluarganya. Dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI No 25 Tahun 2020, pembayaran pendidikan mandiri di Indonesia disebut dengan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT), walaupun mahasiswa lebih mengenal dengan istilah Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagai satuan yang harus dibayar untuk memperoleh pendidikan. Pada undang-undang tersebut dijelaskan komponen yang menentukan besaran

SSBOPT adalah biaya langsung dan biaya tidak langsung. Istilah UKT digunakan pada kampus negeri yang menggunakan subsidi pemerintah. Sementara kampus swasta menggunakan istilah SPP namun akhir-akhir ini juga mulai menggunakan UKT.

Tingkatan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa umumnya ditentukan berdasarkan pendapatan orangtua atau wali mahasiswa. Contoh kebijakan di kampus negeri:

1. Kelompok 1: UKT rendah, cocok untuk mahasiswa dengan pendapatan orangtua atau wali yang rendah yaitu sekitar Rp 500.000,-
2. Kelompok 2: UKT sedang, ditujukan untuk mahasiswa dengan pendapatan keluarga sedang yaitu sekitar Rp 1.000.000,-

Sementara kampus-kampus negeri di Indonesia menambahkan klasifikasi pembayaran UKT berdasarkan pendapatan orangtua atau wali, hal tersebut biasanya dilakukan untuk memberikan keadilan dalam membayar biaya kuliah dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi keluarga mahasiswa. Di bawah ini adalah contoh tingkatan UKT yang umumnya ditemui (Putri, 2023):

1. Kelompok 3: UKT menengah, sesuai untuk mahasiswa dengan pendapatan keluarga yang lebih tinggi dibanding kelompok sebelumnya, sekitar Rp 2.500.000,-
2. Kelompok 4: UKT tinggi, umumnya diperuntukkan bagi mahasiswa dengan tingkat pendapatan keluarga yang tinggi, sekitar Rp 4.000.000,-
3. Kelompok 5 dan 6: UKT sangat tinggi, diperuntukkan bagi mahasiswa dengan tingkat pendapatan keluarga yang sangat tinggi, sekitar Rp 5.000.000,- dan Rp 6.000.000,-

Penting untuk dicatat bahwa jumlah kelompok dan besaran UKT dapat berbeda-beda antar perguruan tinggi dan dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pemilihan kelompok biasanya dilakukan berdasarkan informasi pendapatan orangtua atau wali yang dinyatakan oleh mahasiswa pada formulir pendaftaran atau formulir pemilihan UKT.

Meskipun klasifikasi UKT dilakukan berdasarkan informasi kondisi keuangan orangtua atau wali mahasiswa, banyak terjadi kasus dimana UKT yang dibebankan jauh di atas kesanggupan orangtua atau wali mahasiswa. Hal ini terungkap pada kasus baru-baru ini mengenai tuntutan mahasiswa di ITB terhadap penyediaan solusi mahasiswa yang kesulitan membayar UKT yang kemudian diarahkan untuk menggunakan jasa pinjaman online. Menurut pihak kemahasiswaan jumlah mahasiswa yang terancam oleh pembayaran UKT totalnya berjumlah 206 orang, Ratusan mahasiswa yang sedang kesulitan membayar UKT dan tunggakannya terancam harus cuti dari studinya jika tak memenuhi tenggang pembayaran yang jatuh tempo. Sementara, mahasiswa yang melakukan cuti pun tetap diwajibkan membayar UKT sebesar 50 persen atau Rp.6,25 juta.

Selain kasus tersebut di atas, sebelumnya pada 2023 juga ada kasus di Universitas Indonesia (UI), dimana mahasiswa yang lolos UTBK-SNBP atau jalur prestasi di UI, mempertimbangkan kembali untuk kuliah di UI mengingat mahalnnya biaya UKT Saking tingginya UKT UI, sebanyak 10 calon mahasiswa dari berbagai fakultas mengajukan untuk mengundurkan diri karena nominal yang harus mereka bayar dirasa tak sesuai dengan kondisi perekonomian keluarga. Hal ini memicu demo terkait mahalnnya biaya UKT. oleh BEM UI berdasar pada fakta calon mahasiswa jalur SNBP atau prestasi dikenakan biaya UKT mencapai Rp.20 juta per semester. Bahkan setelah BEM mengajukan keberatan,

sebanyak ratusan calon mahasiswa masih dikenakan UKT sebesar belasan juta. Selain itu, kasus serupa juga terjadi di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), dimana 97 persen dari seribuan mahasiswa yang mengisi angket yang disebarakan “UNY Bergerak” mengaku tak bisa membayar UKT.

Dari laporan BPS (2022), jumlah perguruan tinggi swasta di Indonesia mencapai 2.990 kampus, sedangkan 125 sisanya adalah perguruan tinggi negeri. Kampus swasta terpaksa menawarkan biaya tinggi karena semua biaya harus ditanggung oleh kampus itu sendiri mulai dari pembangunan gedung kampus, operasional sehari-hari dan memastikan kualitas Tridharma dosen. Maka dari itu biaya pendidikan bisa berkali lipat dari yang ditawarkan oleh kampus negeri. Hal ini kemudian menimbulkan masalah pembayaran SPP di kalangan mahasiswa.

2. Metodologi

Penulisan *policy brief* melalui pendekatan metodologi deskriptif umum seperti berikut: 1. Identifikasi tujuan; 2. Proses penelitian dan pencarian data; 3. Analisa manfaat dan biaya; 4. Penentuan analisa pasar tentang pilihan kebijakan; dan 5. Memberikan rekomendasi.

3. Hasil Temuan

Berikut adalah hasil temuan dari penelitian yang telah diadakan, yaitu analisa manfaat dan biaya serta dasar pilihan kebijakan.

3.1. Pre-Existing Policies

Maraknya berita mengenai pinjaman dana pendidikan online yang bekerja sama dengan kampus-kampus di Indonesia, memberikan kekhawatiran publik akan banyaknya mahasiswa yang terjatuh hutang di masa muda dan akan menghadapi kesulitan keuangan di masa depan. Fenomena ini dapat membebani masa depan mereka yang secara tanggung jawab ekonomi juga semakin besar, seiring pergeseran demografi yang menciptakan *sandwich generation* dan beban yang ditanggung untuk membantu penduduk usia lansia yang semakin besar jumlahnya.

Pendidikan adalah salah satu pilar penting dalam pembangunan bangsa. Namun, tingginya biaya pendidikan saat ini menjadi hambatan bagi banyak orang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini mendorong munculnya berbagai skema pinjaman pendidikan atau *student loans* yang ditawarkan lembaga pembiayaan, termasuk oleh perusahaan rintisan teknologi keuangan (*fintech*).

Namun, dari beberapa peristiwa yang dicatat dalam dua tahun terakhir, keterlibatan *fintech* komersial berbasis ribawi yang menawarkan *student loan* justru menuai banyak kontroversi dan kritik. Kebanyakan *fintech* tersebut hanya fokus pada volume dan cenderung mengabaikan mitigasi risiko yang berpotensi menjebak mahasiswa dalam situasi yang lebih sulit, seperti yang dijabarkan sebagai berikut.

Pertama, peluang terjadinya default pada pinjaman komersial cukup tinggi. Hal ini tidak selalu disebabkan oleh *fraud*, tetapi bisa juga karena gaya hidup yang tidak seimbang. Ketika mahasiswa mengalami kesulitan finansial, mereka akan terbebani dengan cicilan pinjaman dengan bunga yang tinggi.

Kedua, jika mahasiswa gagal membayar pinjaman, mereka akan dikejar oleh *debt collector* dan namanya akan masuk daftar Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Hal ini akan menyulitkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan melanjutkan hidup mereka.

Pinjaman dana pendidikan adalah jenis pinjaman yang disediakan oleh berbagai lembaga keuangan untuk membantu peserta didik dalam membiayai biaya kuliah, sekolah, dan kursus. Faktanya adalah pinjaman dana pendidikan telah banyak dipraktikkan di luar negeri, baik untuk kampus-kampus negara maju maupun di negara berkembang. Diolah dari berbagai sumber, di Indonesia sendiri terdapat beberapa lembaga yang menawarkan pinjaman dana pendidikan di Indonesia antara lain:

1. **Edufund**: menyediakan pinjaman dana pendidikan dengan nama produk seperti EduCollege, EduSchool, EduCourse, dan EduCash, yang memberikan akses cicilan pendidikan tanpa agunan. Edufund sejak 2019 telah melayani ribuan pengguna yang terdiri dari para pelajar, mahasiswa, fresh graduate maupun pekerja, dan telah bekerja sama dengan puluhan institusi pendidikan terdiri dari sekolah, universitas, dan tempat kursus dalam bentuk pembiayaan yang bisa digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Adapun beberapa institusi pendidikan yang sudah bekerja sama secara resmi dengan Edufund antara lain, Universitas Pelita Harapan (UPH), IPMI International Business School, SAE Institute Jakarta, Wall Street English (WSE), Algoritma, Purwadhika, dan lainnya. Edufund memiliki ketentuan dengan suku bunga 1,25% flat per bulan, plafon maksimal Rp.200 juta, penalti mulai dari 1% (jika pelunasan dipercepat), denda mulai dari 0,2 % per hari (dari total angsuran), biaya administrasi mulai dari 0,5%, biaya provisi mulai dari 0,5%, tenor pembayaran hingga 60 bulan, jenis agunan aset tetap tidak bergerak.
2. **CICIL Uang Kuliah**: menawarkan pinjaman dana pendidikan hingga Rp.30 juta dengan cicilan ringan hingga 36 bulan, margin rendah, dan perlindungan asuransi. PT CICIL Solusi Mitra Teknologi yang berdomisili di Indonesia, merupakan anak perusahaan CICIL Technologies Private Limited berdomisili di Singapura. CICIL bekerja sama dengan puluhan universitas, dalam bentuk pembiayaan yang bisa digunakan di seluruh wilayah Indonesia seperti Universitas Malikussaleh (UNIMAL), Universitas Udayana (UNUD), Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Universitas Negeri Manado (UNIMA), Universitas Mulawarman (UNMUL), dan lainnya. Dengan tenor hingga 36 bulan. bisa meminjam hingga 80% dari biaya pendidikan yang dibutuhkan dengan bunga 1-1,5% per bulan.
3. **Danacita**: menyediakan pinjaman dana pendidikan untuk biaya kuliah dan kursus, yang bekerjasama dengan ratusan institusi pendidikan di seluruh Indonesia. seperti Universitas Bina Sarana Informatika (BSI) (BSI), RevoU (Revou), Wall Street English (WSE), Universitas Presiden (PU), CoLearn (CoLearn), EF EFEKTA English for Adults (EF EFEKTA English for Adults), Universitas Nusa Mandiri (UNM) (Universitas Nusa Mandiri), Digital Skola (Digital Skola), yang terakhir adalah Institut Teknologi Bandung (ITB) dan lainnya. Ada biaya administrasi sebesar Rp.100.000 dan biaya pinjaman 3% dari total pinjaman. Tenor pinjaman adalah dua kali periode studi yang tersisa.

Pinjaman dana pendidikan di Indonesia memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda, namun umumnya memerlukan dokumen administrasi, seperti KTP, KTM, bukti tagihan dari

institusi pendidikan, dan bukti penjaminan jika peminjam berusia di bawah 21 tahun atau belum memiliki penghasilan.

Namun terdapat polemik dimana terdapat potensi gagal bayar peminjam, yaitu jika sebagian besar peminjam mengalami kesulitan membayar utang mereka yang kemudian menciptakan beban finansial dan menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan sistem *student loan* tersebut. Selain itu potensi beban utang yang tinggi setelah lulus, yang dapat membatasi kemampuan mahasiswa untuk mencapai tujuan keuangan lainnya, seperti membeli rumah atau menikah. Kemudian dari beban utang yang ditanggung, para *fresh graduate* ini pun akan menghadapi ketidakpastian ekonomi yang dapat membuat lebih sulit untuk menemukan pekerjaan atau bisnis yang memberikan cukup pendapatan untuk membayar kembali *student loan*.

3.2. Beasiswa di Indonesia

Ada beberapa jenis beasiswa yang ditawarkan di Indonesia, yaitu: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Beasiswa 5000 Doktor, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), Beasiswa Zakat dan Wakaf, dan beasiswa langsung dari universitas yang dituju.

1. LPDP

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang memulai kegiatannya dari 2013 merupakan Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dana Pendidikan. LPDP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) dan penyaluran hasil pengembangan dana kelolaan tersebut dalam bentuk beasiswa, riset, dan rehabilitasi fasilitas pendidikan. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan yang sekaligus menguatkan peran strategis dalam upaya pengelolaan dana abadi pendidikan ini. Pada 2020, peran LPDP diperluas dengan diberikan mandat pengelolaan anggaran pendidikan non-DPPN seperti Dana Abadi Kebudayaan, Dana Abadi Penelitian, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi.

2. Beasiswa 5000 Doktor

Beasiswa S3 Program 5000 Doktor, lebih dikenal dengan Ministry of Religious Affairs (MORA) Scholarship yaitu Beasiswa Studi Dalam dan Luar Negeri dan Bantuan Penyelesaian Pendidikan Dalam dan Luar Negeri. Beasiswa S2-S3 dalam dan luar negeri Kemenag ini ditujukan bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) dan pegawai negeri sipil (PNS) pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Beasiswa ini menanggung biaya pendaftaran dan ujian seleksi (diberikan bila lulus), biaya SPP, biaya hidup, biaya buku dan referensi, biaya riset, dan tunjangan domisili.

3. Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI)

Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Kemendikbudristek yang telah diselenggarakan sejak tahun 2021. BPI Kemendikbudristek telah menambah dan memperluas jalur penerimaan beasiswa agar dapat merangkul lebih banyak pihak. Melalui BPI, Kemendikbudristek mewujudkan bakti dan dukungannya pada Pendidikan yang lebih berkualitas serta kesetaraan kesempatan dalam menuntut ilmu. Jenis beasiswa BPI adalah sebagai berikut:

- 1) Beasiswa calon guru SMK untuk jenjang S1.

- 2) Beasiswa bagi pelaku budaya dan penyuluh kepercayaan untuk jenjang S1 sampai S3.
- 3) Beasiswa Indonesia Maju (BIM) untuk jenjang S1 dan S2 melalui skema mandiri. BIM juga memiliki skema persiapan yang dikelola Pusat Prestasi Nasional.
- 4) Beasiswa perguruan tinggi akademik jenjang S2 dan S3. Beasiswa ini diperuntukkan bagi dosen, calon dosen, dan tenaga kependidikan.
- 5) Beasiswa perguruan tinggi vokasi untuk jenjang S2 dan S3 bagi dosen dan tenaga kependidikan
- 6) Beasiswa pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan formal dan non formal di lingkungan Kemendikbud Ristek untuk jenjang S2 dan S3.

4. Beasiswa Zakat dan Wakaf

Berdasarkan Fatwa MUI tahun 1996 mengenai zakat untuk beasiswa, hukumnya adalah *mubah*, karena termasuk dalam *ashnaf fi sabilillah*, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan QS At-Taubah (9): 60 dengan alasan bahwa pengertian *fi sabilillah* menurut sebagian ulama fiqh dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah “lafaznya umum.” Pertimbangan bahwa pelajar/mahasiswa/sarjana Muslim, penerima zakat beasiswa adalah: berprestasi akademik; diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu; dan mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Beberapa contoh beasiswa zakat di Indonesia:

Beasiswa BAZNAS

BAZNAS mengeluarkan peraturan no. 3 tahun 2018 mengenai pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pendayagunaan zakat dilakukan di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Beasiswa BAZNAS terdiri dari:

- 1) Beasiswa Cendekia Dalam Negeri
- 2) Beasiswa Cendekia Albukhary International University
- 3) Beasiswa Cendekia Al Azhar, Kairo
- 4) Beasiswa Kaderisasi Seribu Ulama
- 5) Beasiswa Kemitraan BAZNAS
- 6) Beasiswa Riset BAZNAS

Beasiswa Kalla

Beasiswa Kalla berasal dari dana zakat dan infak yang dikelola oleh Yayasan Hadji Kalla. Program ini berupa pemberian Bantuan Beasiswa UKT serta kegiatan peningkatan kapasitas sosial dan akademik untuk para calon penerima Beasiswa Kalla. Hingga tahun 2022, Yayasan Hadji Kalla telah membantu lebih dari 700 mahasiswa/i yang menempuh pendidikan di berbagai Perguruan Tinggi di 4 Provinsi Wilayah Kerja YHK, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Total nilai bantuan pada tahun 2021-2022 mencapai 3.3 Milyar Rupiah.

Beasiswa Wakaf

Beasiswa jenis ini menggunakan hasil kelolaan dari wakaf produktif seperti Beasiswa BWI-IPB dan program beasiswa untuk yatim dan dhuafa dari Wakaf Ikrar Indonesia.

Selain beasiswa di atas, ada beasiswa dari universitas yang dituju, diupayakan oleh pihak universitas misalnya Beasiswa Tazkia di Institut Agama Islam Tazkia. Dana beasiswa berasal dari dana zakat perorangan mitra Tazkia, infak yayasan, APBD pemerintah setempat yang dikelola oleh Yayasan Tazkia Cendekia untuk kuliah di Institut Agama Islam Tazkia.

Skema ini banyak dipraktikkan di kampus-kampus lain di Indonesia. Dari tahun 2017-2022 misalnya, Kampus Tazkia ini berhasil mengelola Rp. 105 milyar dana beasiswa dari mitra strategis baik perorangan, lembaga swasta dan pemerintah daerah.

3.3. Pinjaman (*Student Loan*)

Student loan adalah bantuan kepada mahasiswa yang harus dikembalikan dalam jangka tertentu di kemudian hari. Hal ini sudah menjadi praktik lazim di berbagai negara yaitu:

1. Skema Pinjaman Biaya Pendidikan di Indonesia. Lembaga keuangan syariah (bank dan fintech) yang menawarkan pinjaman pendidikan antara lain:
 - 1) Bank Muamalat Indonesia
Menawarkan produk pembiayaan pendidikan seperti Pembiayaan Hijrah Multiguna dengan margin pricing dan berbagai pilihan kontrak.
 - 2) Bank Syariah Indonesia
Memberikan pembiayaan pendidikan Mitraguna Berkah berdasarkan prinsip Syariah dengan plafond hingga Rp1,5 miliar atau Rp2,5 miliar untuk jenjang pendidikan kedokteran.
 - 3) Dhuha Syariah
Menawarkan pinjaman syariah untuk pendidikan dengan proses pengajuan yang mudah dan jumlah pinjaman hingga Rp 30.000.000.
 - 4) Ammana Fintek
Mirip dengan Duha Syariah, Ammana menawarkan pinjaman pendidikan berbasis syariah mulai dari Rp500.000 hingga Rp10.000.000 dengan jangka waktu pembayaran fleksibel.

2. *Student Loan* di Malaysia. Sistem yang ditawarkan Pemerintah Malaysia ada dua macam tanpa bunga dan dicicil setelah bekerja, dipotong langsung dari gaji sangat rendah karena pembagiannya dalam jangka waktu yang panjang. Skema terbaru yang ditawarkan oleh pemerintah di sana adalah PTPTN atau Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, merupakan lembaga pemerintah yang menawarkan pinjaman pendidikan khusus untuk pendidikan tinggi bagi mahasiswa berwarga negara Malaysia yang penghasilan orangtuanya adalah RM 50,000 (Rp.166 juta) per bulan. Pinjaman PTPTN didasarkan pada prioritas kebutuhan seperti:
 - 1) Keluarga berpenghasilan rendah dapat meminjam dalam jumlah yang lebih besar;
 - 2) Pinjaman untuk institusi swasta lebih tinggi dibandingkan dengan institusi negeri karena biaya kuliah biasanya lebih tinggi; dan
 - 3) Program studi yang berhubungan dengan sains memiliki jumlah pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan program studi humaniora.

Yang perlu diketahui saat mengajukan pinjaman PTPTN:

- 1) Memiliki setidaknya IPK 2.0 untuk mempertahankan pinjaman PTPTN;
- 2) Suku bunga pinjaman PTPTN sebesar 1%;
- 3) Mulai membayar kembali PTPTN 12 bulan setelah lulus. PTPTN tidak akan mengirimkan surat instruksi kepada penerima pinjaman, jadi peminjam harus bertanggung jawab untuk membayar pinjaman studi sesuai dengan jadwal

pembayaran. Adapun jangka waktu pengembalian pinjaman akan tergantung pada jumlah pinjaman PTPTN;

- 4) Pemberian sanksi apabila tidak membayar kembali pinjaman PTPTN. Meningkatnya jumlah penunggak kredit PTPTN (orang-orang yang gagal membayar pinjaman mereka) akan membuat mereka masuk dalam daftar Central Credit Reference Information System (CCRIS). Yaitu sebuah sistem yang menyimpan informasi keuangan peminjam di Malaysia dan digunakan oleh bank untuk menentukan apakah yang bersangkutan adalah peminjam yang baik atau buruk. Jika hingga masuk ke dalam daftar hitam CCRIS adalah masalah serius, karena hal ini dapat membuat seseorang langsung ditolak setiap kali mengajukan permohonan kartu kredit, pinjaman rumah, atau pinjaman pribadi.
- 5) Pinjaman PTPTN dapat dikonversi menjadi beasiswa. Jika peminjam PTPTN menyelesaikan gelar dengan First Class Honours, maka akan dibebaskan dari membayar kembali pinjaman PTPTN, yang berarti menerima beasiswa penuh. Secara umum, First Class Honours biasanya mengharuskan peminjam PTPTN memiliki IPK minimal 3.67/4.00, atau lebih tinggi.

3. *Student Loan* di Singapura. Di Singapura, terdapat beberapa pilihan pinjaman untuk mahasiswa antara lain:

- 1) Pinjaman Studi OCBC
- 2) Pinjaman Studi DBS
- 3) Pinjaman Studi untuk mahasiswa di universitas dan politeknik
- 4) Pinjaman Belajar untuk siswa di Akademi Seni Rupa Nanyang
- 5) Pinjaman Studi untuk mahasiswa di Nanyang Technological University, Singapore Institute of Technology, Singapore University of Social Sciences, dan Singapore University of Technology and Design

Pinjaman ini menawarkan berbagai fitur seperti subsidi biaya pendidikan, tunjangan hidup, suku bunga rendah, jangka waktu pembayaran yang fleksibel, dan kemitraan dengan lembaga pendidikan tertentu.

4. *Student Loan* di Australia. Universitas-universitas di seluruh Australia menyediakan pinjaman untuk mahasiswa lokal dan internasional. Sebagian besar institusi menawarkan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang; ini dapat membantu mahasiswa untuk menutupi keadaan darurat, serta membayar biaya hidup. Berikut adalah beberapa contoh universitas yang menyediakan pinjaman untuk mahasiswa:

- 1) University of Melbourne akan meminjamkan mahasiswa yang memenuhi syarat hingga AU\$5.000 jika mereka memiliki penandatanganan pendamping dari Australia. Mereka akan meminjamkan siswa hingga AU\$3.000 jika penandatanganan pendamping mereka tinggal di luar negeri atau bukan warga negara/penduduk tetap Australia.
- 2) University of Sydney menawarkan pinjaman hingga AU\$ 2.000 yang dapat dilunasi hingga dua tahun setelah kelulusan.
- 3) Mahasiswa yang membutuhkan bantuan keuangan di Monash University dapat mengambil pinjaman antara AU\$750 - 3,000 yang akan dilunasi dalam waktu 6-12 bulan.

5. *Student Loan* di Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam, terdapat beberapa pilihan pinjaman mahasiswa yang tersedia untuk membiayai pendidikan, termasuk:
 - 1) Pinjaman Studi Baiduri Bank
 1. Suku bunga efektif 6,0% per tahun
 2. Tenor pinjaman hingga 6 tahun
 3. Pendanaan akan mencakup biaya tiket pesawat, biaya pendaftaran, biaya pendidikan, akomodasi dan biaya hidup lainnya
 4. Perlindungan asuransi perlindungan pinjaman
 5. Tersedia 2 jenis skema: anak-anak untuk melanjutkan studi lanjutan dan orang dewasa yang sudah bekerja untuk melanjutkan studi (dalam skema layanan)
 - 2) Pinjaman Studi TAIB
 1. Menggunakan akad syariah; Tawarruq
 2. Warga negara Brunei dan penduduk tetap
 3. Karyawan Pemerintah Brunei dan sektor swasta tertentu
 4. Tenor pinjaman 7 – 10 tahun
 5. Maksimum pinjaman \$250.000

6. *Studi Loan* di Filipina. Di Filipina, terdapat beberapa pilihan pinjaman mahasiswa yang tersedia untuk membiayai pendidikan, termasuk:
 - 1) CHED Student Loan Program
 - 2) SSS Educational Assistance Loan Program
 - 3) GSIS Education Loan
 - 4) Pag-IBIG Multi Purpose Loan
 - 5) LANDBANK I-STUDY Program
 - 6) Union Bank Personal Loans
 - 7) BPI SIP Loan for School
 - 8) Bukas Tuition Instalment Plan
 - 9) InvestEd Student Loan
 - 10) University of the Philippines Diliman (UP Diliman) Student Loan Program
 - 11) University of the Philippines - Los Baños Student Loan Board Program
 - 12) De La Salle University (DLSU) Student Loan Program
 - 13) Mapua University Student Financial Assistance Program (STUFAP)
 - 14) Digidio Cash Loan

7. *Student Loan di Inggris*. Pemerintah Inggris menawarkan *student loan* dengan bunga rendah bagi yang di atas kelompok berpendapatan rendah. Pinjaman dibayar ketika setelah bekerja, dibagi dengan waktu yang cukup panjang. Kalau si peminjam masuk kategori berpendapatan rendah atau disabilitas, maka jatuhnya menjadi beasiswa. Sebuah petisi sudah dibuatkan sejak dari 2013-2017 untuk dibuatkan menjadi pinjaman berbasis syariah tapi hingga saat masih berstatus *on hold* sampai dengan 2025.

8. Perusahaan yang memberikan Peluang Bantuan Pinjaman Dana Pendidikan di Kawasan Asia Tenggara: Zomia SPC adalah perusahaan bertujuan sosial untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi di kalangan pelajar dari komunitas marginal (berdiri sejak 2014). Perusahaan ini memberikan pinjaman pendidikan terjangkau dengan sistem P2P Lending kepada

siswa dari komunitas marginal yang didanai oleh individu dan lembaga filantropis dari seluruh dunia.

3.4. Analisa Manfaat dan Biaya

Pembayaran biaya pendidikan yang ada di Indonesia bertambah dengan adanya produk pinjaman khusus untuk pendidikan. Hal ini dikarenakan sifat beasiswa adalah bantuan keuangan yang tidak perlu dibayar kembali dan kesempatan mendapatkan paket beasiswa adalah sangat terbatas. Penyedia beasiswa biasanya berasal dari institusi pendidikan baik institusi negeri dan swasta, juga dari lembaga pemerintah dan lembaga sosial. Beasiswa ditawarkan dengan dapat didasarkan pada prestasi, kemampuan ekonomi dan parameter lainnya. Oleh karena itu, pengembalian beasiswa biasanya berbentuk bakti, baik terikat maupun tidak terikat. Sementara itu, pinjaman pendidikan untuk mahasiswa adalah jenis bantuan keuangan yang harus dibayar kembali oleh peminjam. Penyedia pinjaman dapat berasal dari lembaga keuangan yang biasanya menawarkan pinjaman pendidikan untuk mahasiswa, dengan persyaratan kemampuan peminjam dalam membayar kembali pinjamannya, selain itu pinjaman pendidikan tersedia hanya jika mahasiswa yang bersangkutan memenuhi persyaratan. Lebih lanjut, pinjaman pendidikan memiliki risiko gagal bayar dalam pinjaman pendidikan untuk pelajar sehingga dapat merugikan peminjam jika terjadi gagal bayar.

Praktik pinjaman mahasiswa bukan hal yang baru dan sudah banyak dilakukan di beberapa negara. menurut Jawahrani (2022), pinjaman mahasiswa memungkinkan mahasiswa untuk fokus pada studi mereka tanpa harus bekerja paruh waktu untuk menutupi biaya hidup, SPP, dan kebutuhan lainnya. Selain itu, pinjaman mahasiswa juga mendukung reformasi pendidikan dan mempromosikan kesempatan pendidikan yang setara terutama bagi siswa yang membutuhkan untuk menyelesaikan studi mereka, dengan manfaat ekonomi berdasarkan pengukuran tingkat kehidupan (Guo-Ping, 2008).

Meskipun pinjaman mahasiswa sudah banyak dilakukan di beberapa negara maju, seperti di Amerika Serikat. Berdasarkan Jawahrani (2022), Pinjaman mahasiswa di Amerika Serikat berdampak pada hampir 44,7 juta debitur, dengan total utang lebih dari US\$1,71 triliun. Meskipun pinjaman mahasiswa memainkan peran besar dalam pembiayaan pendidikan tinggi, beban utang pasca sekolah menengah itu menyebabkan frustrasi dan kecemasan di kalangan generasi muda, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk menghidupi diri sendiri hingga ke kehidupan pernikahan, sehingga berpotensi menimbulkan masalah keluarga di AS. Anak-anak muda yang memiliki utang biaya pendidikan khawatir bahwa utang ini akan berdampak pada kemampuan mereka untuk menghidupi diri sendiri sehingga khawatir untuk beralih peran untuk menjadi pasangan suami-istri. Meskipun hal ini berbeda-beda berdasarkan latar belakang kelas sosial dan tingkat utang (Napolitano et al., 2021) .

Lebih lanjut, Gayardon et al. (2021) menjelaskan, utang pinjaman mahasiswa dan kebijakan pendanaan pendidikan tinggi secara signifikan mempengaruhi kepemilikan perumahan kaum muda di Inggris, dimana lulusan yang tidak meminjam untuk kuliahnya lebih besar kemungkinannya untuk memiliki rumah dan kecil kemungkinannya untuk menyewa atau tinggal bersama orang tuanya. Bahkan menurut Harris et al. (2021), sistem pinjaman mahasiswa dapat dilihat sebagai bentuk kekerasan simbolik, melanggengkan stratifikasi yang ada dan mempengaruhi stabilitas psikologis pandangan terhadap masa depan

Selain masalah yang muncul dari pinjaman pendidikan di negara maju, terdapat pula masalah yang muncul dari pinjaman pendidikan di negara berkembang. Penelitian yang dilakukan Shen dan Hiderman (2009) pada 39 negara berkembang, menunjukkan bahwa skema pinjaman mahasiswa beroperasi di lebih dari tujuh puluh negara di seluruh dunia. Sebagian besar skema pinjaman mendapat manfaat dari subsidi pemerintah yang cukup besar dan jika ada kerugian dari kegagalan pembayaran maka tidak dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan. Selain itu, banyak skema pinjaman menawarkan keringanan yang cukup besar yang diberikan kepada peminjam. Namun, dari skema-skema yang diteliti, rasio pembayaran utang pendidikan oleh para pelajar adalah kurang lebih 40% bahkan penyelesaian pinjamannya secara keseluruhan jauh lebih rendah. Tantangan lain yang ada pada skema pinjaman biaya pendidikan di negara-negara berkembang adalah kebijakan yang tidak relevan, masalah sistem aplikasi, dan masalah pembayaran pinjaman, yang mempengaruhi program pemberdayaan masyarakat lainnya (Dimmera, B, 2019).

3.5. Dasar Pilihan Kebijakan

Dari paparan di bagian sebelumnya dengan jumlah universitas bersubsidi semakin terbatas, tuntutan kampus yang dapat memberikan kualitas fasilitas dan mutu pendidikan yang tinggi ditambah dengan semakin banyak perusahaan yang mensyaratkan pendidikan tinggi dalam hal rekrutmen, kompetisi mendapatkan pekerjaan bergengsi yang makin tinggi, menyebabkan biaya pendidikan makin tidak dapat ditangani banyak keluarga di Indonesia. Hal ini kemudian memicu kebutuhan yang makin tinggi untuk mendapatkan beasiswa, potongan biaya pendidikan, atau skema cicilan dari kampus. Namun karena jumlah beasiswa juga terbatas dan banyak kampus yang tidak melayani kemudahan dalam skema pembayaran, maka kebutuhan untuk meminjam dari lembaga komersial menjadi solusi. Ditambah pula kebiasaan dalam merencanakan pendidikan anak di perguruan tinggi tidak banyak dipraktikkan oleh banyak keluarga di Indonesia. Di banyak kajian Sakinah Finance, hanya 10% dari jumlah peserta mengaku sudah mengatur keuangan pendidikan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi, selebihnya cenderung memikirkan kebutuhan jangka pendek dan menengah dalam hal kebutuhan sekunder dan tersier seperti menikah, renovasi rumah, jalan-jalan, pergi haji atau umrah. Mereka meletakkan kebutuhan pendidikan tinggi bukan sebagai kebutuhan primer karena menurut mereka kebutuhan pendidikan yang primer adalah hanya hingga sekolah menengah atas.

Walau cukup berat dalam hal cicilan pembayaran skema pinjaman biaya kuliah yang bersifat komersial, mahasiswa dan keluarganya yakin kalau dengan mengenyam pendidikan tinggi dan berhasil lulus dengan baik, jerih payah dalam membayar cicilan akan terbayarkan yaitu dengan cara didapatkannya pekerjaan bergengsi bergaji tinggi. Namun tetap saja tidak dapat dijanjikan, lihat saja jumlah pengangguran terbuka masih cukup tinggi yaitu 4.59% dengan tingkat pendidikan Diploma I/II/III dan 4.8% dengan tingkat pendidikan universitas (BPS, 2023). Dari statistik lainnya, didapati jumlah pengangguran lulus pendidikan tinggi juga cukup mengkhawatirkan, banyak kampus yang tidak dapat memenuhi target untuk memastikan lulusannya direkrut oleh dunia kerja tiga bulan setelah kelulusan. Hal ini dapat dilihat dari laporan Kemendikbud yang menyebutkan bahwa sebanyak 13,33% lulusan perguruan tinggi masih berstatus pengangguran, yaitu dengan jumlah 1.120.128 orang dari 235.559 kampus vokasi dan 884.759 orang dari perguruan tinggi akademik (detikEdu, 2023). Dengan kenyataan yang ada, maka sistem pinjaman pendidikan mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah, bahkan mungkin akan menimbulkan masalah baru seperti yang

terjadi di Amerika. Tabel berikut menjelaskan analisa Manfaat dan Biaya (*Benefits and Costs*) untuk beasiswa dan pinjaman yang selama ini dipraktikkan di berbagai negara (dari perspektif mahasiswa):

Tabel 1. Perbandingan Manfaat dan Biaya Skema Beasiswa dan Pinjaman

Analisa	Beasiswa	Pinjaman Komersial	Pinjaman Sosial
Manfaat	<p>Menanamkan motivasi untuk terus berprestasi dan bersaing</p> <p>Memberikan kesempatan bagi yang tidak mampu untuk ikut berkompetisi</p> <p>Sesuai dengan tujuan distribusi zakat yaitu untuk mustahik dari golongan <i>fii sabilillah</i></p> <p>Diawasi oleh individu (jika beasiswa dari individu) atau instansi resmi (jika pemberi beasiswa dari instansi tertentu/kampus negeri atau swasta/lembaga zakat)</p>	<p>Memberikan kesempatan bagi yang tidak dapat beasiswa</p> <p>Menyediakan solusi untuk keluarga yang mampu namun mengalami masalah dana likuid</p> <p>Banyak pilihan penyedia pinjaman dan skema</p> <p>Mudah didapatkan</p> <p>Tidak ada ikatan dinas</p> <p>Diawasi oleh BI/OJK bagi yang berstatus legal</p>	<p>Memberikan kesempatan bagi yang tidak dapat beasiswa dan tidak layak mendapatkan pinjaman komersial</p> <p>Menjadi ajang perbaikan untuk berprestasi jika ada skema konversi pinjaman menjadi beasiswa</p> <p>Tidak memberatkan keluarga karena tidak ada tambahan bunga/margin</p> <p>Masa pengembalian pinjaman bisa dalam jangka panjang</p>
Biaya	<p>Tidak semua mendapatkan kesempatan</p> <p>Banyak syarat yang hanya bisa dipenuhi oleh keluarga yang sangat miskin saja misalnya pengecekan rekening listrik dan air, Surat Keterangan Tidak Mampu, dan Slip Gaji Orangtua.</p> <p>Adanya ikatan dinas</p>	<p>Memberatkan karena adanya tambahan bunga/margin</p> <p>Memerlukan perencanaan pengembalian pinjaman dalam jangka pendek</p>	<p>Tidak banyak yang menawarkan</p> <p>Sangat kompetitif karena akan lebih banyak yang memilih skema ini</p> <p>Sebagian mewajibkan ikatan dinas</p> <p>Kualitas pengembalian rendah jika tidak dibantu dengan perjanjian yang ketat dan konsekuensi yang berat</p>

4. Rekomendasi dan Mekanisme dalam Implementasi Kebijakan

Dari analisa di atas, maka rekomendasi yang disampaikan adalah **Bantuan Biaya Kuliah Mahasiswa dengan Skema Pinjaman Sosial**. Hal ini dikarenakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, BAB XIII, Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan, bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran." Untuk memastikan mekanisme tata kelola yang baik untuk skema ini, maka organ-organ berikut harus membantu proses implementasi:

A. Pemerintah

- a. Yang dimaksud dengan pemerintah dalam hal ini antara lain adalah: 1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI; 2. Kementerian Agama RI; 3. Badan Amil Zakat Nasional; 4. Badan Wakaf Indonesia.
- b. Mengadakan perluasan literasi manajemen keuangan keluarga, terutama bagi keluarga muda untuk disiplin dalam merencanakan pendidikan bagi anak-anaknya, misalnya dengan mulai mempersiapkan sejak dini melalui bisnis, peruntukan aset, tabungan atau asuransi pendidikan.
- c. Mengawasi skema yang ditawarkan oleh instansi pemerintah atau perlu dicermati bahwa pinjaman dana pendidikan saat ini sifatnya (pinjaman) jangka pendek, sedangkan untuk dana pendidikan seharusnya masuk kategori jangka panjang.
- d. Membuat aturan penetapan biaya pendidikan di perguruan tinggi untuk mencegah orientasi bisnis di dunia pendidikan.

B. Penyedia Pinjaman Sosial

- a. Yang dimaksud dengan penyedia pinjaman sosial ini antara lain adalah lembaga pengelola dana pendidikan seperti LPDP, lembaga sosial seperti Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia.
- b. Memperluas cakupan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) untuk disalurkan bukan hanya terbatas pada beasiswa, riset, dan rehabilitasi fasilitas pendidikan tapi juga pinjaman pendidikan. Belajar dari pengalaman di beberapa negara, DPPN disalurkan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga/margin yang dikembalikan jika peserta tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan misalnya nilai IPK, prestasi nasional dan internasional, dan lain sebagainya. Adapun masa pengembalian dapat ditentukan dengan jangka waktu 1-20 tahun setelah lulus dari program dimonitor oleh divisi khusus di bawah LPDP bekerjasama dengan lembaga keuangan. Jika peserta memenuhi persyaratan yang sudah dicantumkan bisa juga pinjaman dapat dikonversi menjadi beasiswa.
- c. Menetapkan skema pinjaman dari dana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang memiliki dana kelolaan hampir Rp.140 juta hingga 2023, di mana setiap tahun pemerintah mengalokasikan Rp.20 triliun untuk dana abadi tersebut. Dana tersebut berasal dari anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran belanja negara dalam APBN. LPDP dapat menjalin kerjasama dengan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO), yang merupakan konsorsium yang terdiri dari anggota bank syariah, yaitu BPD Syariah dan BPR Syariah, sehingga meluas jangkauannya di seluruh Indonesia. Syarat dan ketentuan penerimaan, serta mekanisme pembiayaan yang disepakati dengan ASBISINDO, mensyaratkan keterlibatan dengan bank syariah karena sifatnya yang tanpa bunga, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Mekanisme operasional yang terperinci dapat didiskusikan dengan asosiasi tersebut.

- d. Menggunakan dana pendidikan dengan akad *tabarru'* (tolong- menolong), dimana solusi *student loan* yang lebih tepat adalah dengan memanfaatkan dana zakat, infak, sedekah, wakaf (ziswaf) untuk dijadikan *qardhul hasan* (pinjaman tanpa bunga) atau bahkan hibah (beasiswa). Dana-dana ini memiliki beberapa keuntungan:
 - i. Lebih berpihak kepada mahasiswa: dana ziswaf tidak ditambah dengan bunga pinjaman karena tidak bersifat komersial. Hal ini akan meringankan beban mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikannya.
 - ii. Lebih aman: dana-dana ini dikelola oleh lembaga yang terpercaya dan memiliki tujuan untuk membantu pendidikan. Risiko terjadinya gagal bayar jauh lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman komersial.
 - iii. Lebih adil: dana-dana ini dapat didistribusikan kepada mahasiswa yang benar-benar membutuhkan, tanpa terbebani oleh persyaratan yang ketat seperti pada pinjaman komersial.
 - iv. Dengan demikian, solusi *student loan* yang memanfaatkan dana ziswaf adalah solusi yang lebih tepat dan berkelanjutan untuk membantu pendidikan di Indonesia.
- e. Skema lain yang dirasa lebih sesuai dengan bantuan biaya pendidikan adalah penyediaan wakaf untuk fasilitas pendidikan di semua kampus terutama kampus swasta (seperti gedung, perlengkapan sekolah/kuliah, dan lainnya) sehingga dapat mengurangi biaya pendidikan yang ditawarkan kepada mahasiswa. Begitu juga penggunaan wakaf produktif dapat memberikan tambahan untuk biaya hidup mahasiswa yang tidak mampu.

Demikian *policy brief* ini kami sampaikan, semoga rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi solusi atas masalah keuangan yang dihadapi oleh mahasiswa kurang mampu di Indonesia.

7 Maret 2024/26 Sya'ban1445H



Prof. Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc., CFP, IFP, AEPP
Pimpinan Sakinah Finance

Tim Pengusul:

Murniati Mukhlisin (Prof. Dr. M.Acc, CFP, IFP, AEPP)

Rahmat Mulyana (Dr., MM)

Ratna Komalasari (PhD Candidate)

Reza Jamilah Fikri (M.E.)

Dila Pujanah (S.E)

Daftar Pustaka

- BPS (2022). Inflasi. Terdapat di [Inflasi year-on-year \(y-on-y\) pada Juni 2023 sebesar 3,52 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Ambon sebesar 6,10 persen.](#) - Badan Pusat Statistik Indonesia, diakses pada 28 Februari 2024.
- BPS (2023). Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2021-2022. Terdapat di <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE3OSMy/tingkat-pengangguran-terbuka-berdasarkan-tingkat-pendidikan.html>, diakses pada 28 Februari 2024.
- detikEdu (2023). Kemendikbudristek: 13,33% Lulusan Perguruan Tinggi Masih Pengangguran. Terdapat di [Kemendikbudristek: 13,33% Lulusan Perguruan Tinggi Masih Pengangguran](#), diakses pada 28 Februari 2024.
- Dimmera, B. (2019). Impact of Student Loan in Empowerment the Communities. Management and Sustainable Development Journal. <https://doi.org/10.46229/msdj.v1i1.94>.
- Guo-ping, X. (2008). Study of Economic Benefit of Student Loan for Needy Students Based on the Living Level Measurement. Mathematics in Practice and Theory.
- Gayardon, A., Callender, C., & Desjardins, S. (2021). Does Student Loan Debt Structure Young People's Housing Tenure? Evidence from England. Journal of Social Policy, 51, 221 - 241. <https://doi.org/10.1017/S004727942000077X>.
- Harris, D., Vigurs, K., & Jones, S. (2021). Student loans as symbolic violence. Journal of Higher Education Policy and Management, 43, 132 - 146. <https://doi.org/10.1080/1360080X.2020.1771507>.
- Jawahrani, L. (2022). Student Loans in America. INTERANTIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT. <https://doi.org/10.55041/ijrsrem16648>.
- Napolitano, L., Tevington, P., Carr, P., & Kefalas, M. (2021). "Longer than I Would've Originally Liked and Originally Thought": Postsecondary Debt and Marriage Plans for Young Adults Coming of Age in the Great Recession. Sociological Perspectives, 65, 684 - 701. <https://doi.org/10.1177/07311214211052019>
- Putri, A. (2023). Berapa Rata-rata Biaya Kuliah? Berikut Rinciannya!. <https://danacita.co.id/blog/berapa-rata-rata-biaya-kuliah-berikut-rinciannya/>.
- Shen, H., & Ziderman, A. (2009). Student loans repayment and recovery: international comparisons. Higher Education, 57, 315-333. <https://doi.org/10.1111/j.0042-7092.2007.00700.x>

